



PROVINSI PAPUA TENGAH		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor: 37.00/04.0/000295/L5/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023	
Nomor SPM	: 37.00/03.0/000328/L5/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023	Dari	: BUD
Tanggal	: 21 Desember 2023	Tahun Anggaran	: 2023
SKPD	: MAJELIS RAKYAT PAPUA		
Bank Pengirim : Bank Papua Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 900.01.02.111112-2 Uang sebesar Rp220.900.000 (terbilang: dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)			
Kepada	: TERLAMPIR		
NPWP	: 405253931954000		
No. Rekening Bank	: 0000000000		
Bank Penerima	: Bank Papua		
Kepatuhan Untuk	: Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif MRP (Bagian Keuangan) Sub Kegiatan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sesuai daftar terlampir (OTSUS BG)		
Pagu Anggaran	: Rp3.730.756.429		
Sumber Dana	: 1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus		
NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	9.02.02.3.02	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	Rp220.900.000
2	9.02.02.3.02.01	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Rp220.900.000
3	S.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp220.900.000
Jumlah			Rp220.900.000
Potongan-potongan:			
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	PPH 21	10.907.500	
Jumlah		10.907.500	
SP2D yang Dibayarkan			
Jumlah yang Diminta (Bruto)		Rp220.900.000	
Jumlah Potongan		Rp10.907.500	
Jumlah Netto		Rp209.992.500	
Jumlah yang Dibayarkan		Rp220.900.000	
Uang Sejumlah: dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah			
		<div>29 Desember 2023 BENDAHARA UMUM DAERAH  BPPKAD YOHAN TONO TENOUYE, S.E. NIP. 197001291997011001</div>	
Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3: Arsip Kuasa BUD Lembar 4: Pihak Penerima			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
KELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire - Papua Tengah 98811

CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS

Honorarium/Penghasilan lainnya, Lembur,
dan Biaya Perjalanan Dinas

- ☒ Ringkasan SPP-LS;
- ☒ Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- ☒ Pengantar SPM-LS;
- ☒ SPM-LS;
- ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS
- ☒ Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- ☒ SK Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan/Penetapan Jabatan (pada awal pencairan);
- ☒ Daftar Penerimaan Honorarium;
- ☒ Daftar Potongan & E-biling PPh 21 (apabila ada);
- ☐ Surat Tugas/Surat Perintah Tugas;
- ☐ Surat Perintah Lembur;
- ☐ Daftar Pembayaran Lembur;
- ☐ Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- ☐ Visum SPPD;
- ☐ Bukti Tiket, boarding pass Pesawat dan Hotel;
- ☐ Kwitansi Bermaterai Penerima SPPD;
- ☒ Lembar Verifikasi PPK-SKPD;
- ☐ Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli.

Yang memverifikasi

NIP.

Nabire, 2023
Mengetahui/Menyetujui
Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan

Much Suroto, ST
NIP. 19740221 200012 1 005

* Daftar Penerima honor pengas Pakai Golongan ✓
* Susunan Keanggotaan Panitia dibetulkan ✓
* No Ruc Bank Salan di RPM ✓

⊙ Jumlah di daftar . Rp. 29.300.000 x

⊙ SPM Rp 220.900.000 ✓

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

Jl. Mandala-Kelurahan Bumi Wonorejo Kabupaten Nabire

Nomor : 900/729/SET/MRP/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Penting
Hal : Pengantar SPM LS

Nabire 21 Desember 2023
Kepada
Yth . Kepala Bidang Perbendaharaan
BPPKAD Provinsi Papua Tengah

di
N A B I R E

Berdasarkan Peraturan Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka kami kirimkan SPM-LS untuk Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif MRP (Bagian Keuangan) Sub Keg. Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota (OTSUS BG) untuk keperluan Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah sebagaimana berikut :

No	SPM		Penerima (Pihak Ketiga)	Jumlah yang diminta
	Tanggal SPM	Nomor SPM		
1.	21 Desember 2023	37.00/03.0/000328/ LS/9.03.0.00.0.00.2 2.0000/P.03/12/2023	TERLAMPIR	Rp.220.900.000

Demikian untuk diketahui dan mohon persetujuannya

SEKRETARIS MRP
PROVINSI PAPUA TENGAH



DANIEL MAIPON, S.STP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197604281996121001

Dokumen Checklist/ Penelitian Kelengkapan SPM-LS

LIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS

LS Pengadaan Barang dan Jasa

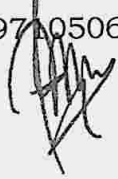
Ringkasan SPP-LS;

- ☒ Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- ☒ Pengantar SPM-LS;
- ☒ SPM-LS;
- ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
- ☒ Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- ☒ Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;
- ☒ Bukti pembelian/nota pembelian (untuk pengadaan/pembelian sampai dengan Rp. 10.000.000,-);
- ☐ Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (untuk pengadaan diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-);
- ☐ Berita Acara hasil pelelangan ;
- ☐ RAB;
- ☐ Faktu Barang ;
- ☐ Faktur Tagihan;
- ☐ Dokumentasi Barang ;
- ☐ Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
- ☐ Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
- ☐ Surat Permohonan Pembayaran;
- ☐ Berita Acara Pembayaran;
- ☐ Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
- ☐ Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);
- ☐ Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;
- ☐ Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
- ☐ Surat Perintah Pengiriman untuk barang;
- ☐ Referensi bank;
- ☐ Surat Jaminan bank;
- ☐ Fotocopy rekening giro bank;
- ☐ Fotocopy NPWP/PPK;

Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang
dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;
G PPh dan PPN;
struktur pajak;
tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;
nyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Nama : MATILDA MOSE, S.Sos
Tanggal : 21 Desember 2023
NIP : 197105062003122008
Tanda Tangan : 

DAERAH
PAPUA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

No. SPM: 37.00/03.0/000328/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

DAERAH
PAPUA TENGAH

D kepada:

: MAJELIS RAKYAT PAPUA
: TERLAMPIR

g Bank : 0000000000

ank : Bank Papua

: 405253931954000

asar Pembayaran : 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023

Sumber Dana : 1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus

Untuk Keperluan:

Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif MRP (Bagian Keuangan) Sub Kegiatan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sesuai daftar terlampir (OTSUS BG)

Pembebanan pada kode kegiatan

KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI
SPD - 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023		
9.02.02.3.02	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	Rp220.900.000
9.02.02.3.02.01	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Rp220.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp220.900.000
Jumlah		Rp220.900.000

Potongan-potongan:

No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah
1	PPH 21	028339540015075	Rp10.907.500
Jumlah			Rp10.907.500

Informasi: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp220.900.000
Jumlah Potongan	Rp10.907.500
Jumlah Netto	Rp209.992.500
Jumlah yang Dibayarkan	Rp220.900.000

Uang sejumlah: (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)



Jumlah SPP yang Diminta: Rp220.900.000

(terbilang: dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Nomor dan Tanggal SPP

37.00/02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21-12-2023

Nabire, 21 Desember 2023

Pengguna Anggaran

PEMERINTAH DAERAH
PAPUA TENGAH
DANIEL MAIPON, S.STP

NIP. 197604231996121001

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA

*) coret yang tidak perlu

PERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

KAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 37.00/03.0/000328/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 37.00/03.0/000328/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang saya ajukan sebesar Rp220.900.000 (terbilang dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan MAJELIS RAKYAT PAPUA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di MAJELIS RAKYAT PAPUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023
Pengguna Anggaran



DANIEL MAIPON, S.STP

NIP. 197604231996121001

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : MATILDA MOSE. S.Sos
NIP : 197105062003122008
jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 37.00/02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 21 Desember 2023
PPK SKPD



MATILDA MOSE. S.Sos
NIP. 197105062003122008

KABUPATEN KINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

MAJELIS RAKYAT PAPUA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: 37.00/02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp220.900.000 (terbilang dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan MAJELIS RAKYAT PAPUA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023

Pengguna Anggaran



DANIEL MAIPON, S.STP

NIP. 197604231996121001

KABUPATEN KINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: 37.00/02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp220.900.000 (terbilang dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan MAJELIS RAKYAT PAPUA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023
Pengguna Anggaran



DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 197604231996121001

PROVINSI PAPUA TENGAH
PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Langsung Barang dan Jasa

SPP-LS

1.	Nama Kerja	:	MAJELIS RAKYAT PAPUA
2.	Nama Sub Kegiatan	:	terlampir
3.	Pengguna Anggaran	:	DANIEL MAIPON, S.STP
4.	PTK	:	OCTOFIANUS KARUBABA. S.Sos
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	MARYAM NGANGUN
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	405253931954000
7.	Nama Bank	:	Bank Papua
8.	Nomor Rekening Bank	:	9000102000212
9.	Untuk Keperluan	:	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif MRP (Bagian Keuangan) Sub Kegiatan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sesuai daftar terlampir (OTSUS BG)
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPD nomor: 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023 tanggal 30-06-2023
			Sebesar: Rp220.900.000 (terbilang: dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Uraian

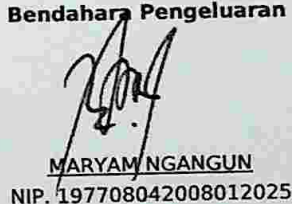
No			
I	SPD		
	Tanggal : 30-06-2023	Nomor : 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Rp5.753.260.229
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal : -	Nomor : -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


OCTOFIANUS KARUBABA. S.Sos
NIP. 197910232015031001

Nabire, 21 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran


MARYAM NGANGUN
NIP. 197708042008012025



Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PROVINSI PAPUA TENGAH
PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Uraian		Jumlah
01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023		
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban		
Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota		
2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp220.900.000

TOTAL : Rp220.900.000

Terbilang: dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah.

Mengetahui/Menyetujui,
Pengguna Anggaran

DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 197604231996121001

Nabire, 21 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran

MARYAM NGANGUN
NIP. 197708042008012025

TAH PROVINSI PAPUA TENGAH
MAJELIS RAKYAT PAPUA
Mandala Kelurahan Bumi wonorejo Nabire – Papua Tengah

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA

NOMOR : 800 / 14 / 855 MRP - PPT

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PEMILIHAN
PIMPINAN DEFINITIF MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan kegiatan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua tengah di maksud, dipandang perlu untuk membentuk panitia Pelaksanaan Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Majelis Rakyat Papua.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 9);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4321 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;

Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 103 Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;
Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 104 Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Daftar Urut Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyiapkan Tempat dan Persiapan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 2. Melaksanakan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;
 3. Melaporkan Hasil Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire
Pada tanggal : 19 Desember 2023


SEKRETARIS
MAJELIS RAKYAT PAPUA

DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 19760423 199612 1 001

SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA
800 / 14 / SET MRP - PPT
: 19 DESEMBER 2023

AN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANAAN PEMILIHAN
N DEFINITIF MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

ENANGGUNG JAWAB

: DANIEL MAIPON, S.STP

II. KETUA

: MATILDA MOSE, S.Sos

III. SEKRETARIS

: RONI ABIDONDIFU, S.STP., M.Si

IV. ANGGOTA

1. FRANSISKUS ADI, S.Sos
2. EMMANUEL MOTE, S.STP
3. BENYAMIN KARETH, SH., M.HUM
4. MENASE YOTENI, SH
5. YERMIAS BINDOSANO, SH
6. MUHAMAD TARMIZI RUMKEL, S.STP
7. BARNABAS HUKUBUN, S.Pi
8. CHRISTINA, S.Si
9. NIKSON IMANUEL WAROMI, S.IP
10. OCTOFIANUS KARUBABA, S.Sos
11. LETRINCE RARAWI, S.Sos
12. MELIAKIM MONEI, S.IP
13. YOHANNA WELMINA MANDOWEN
14. AGUNG WIRATMO, ST
15. MARYAM NGANGUN
16. LIENTJE, S.Sos
17. HOLINCE SOINDEMI, A.Md
18. MARGARETHA HELENA SAWO, A.Md
19. ADRIAN MJESFA, S.Sos., M.Si
20. YOSEP MANUARON
21. RONALD MUAL
22. YAN MANIANI
23. CHRIS MARVIN SIHASALE
24. JOHANES TAMA MARAN
25. SILVIA SIPORA SALOMINA MAREY, S.Tr.IP
26. WINARNI
27. FRIST FEDERICH RARU, ST
28. ABDULA BARAWERI
29. HERMAN LETRORA
30. HESIA MELBUKRANI
31. HILDA FIHAN MONAR
32. YULIUS WANGGAI
33. EKLEVYNA UNHEMORA
34. RIVAN TELENGGEN
35. DEREK ANTON REWANG
36. ELVIS VELIX ECBERT MARO
37. THOMSON WOISIRI
38. NEHEMIA LAWARI
39. ORPA MANUARON

MAGESAN
A OCTOVIA TOROBI
MUABUAY
AN KARLY MATHEUS, S.Kom



SEKRETARIS
MAJELIS RAKYAT PAPUA

DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 19760423 199612 1 001

MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH

Desa Mandala Kelurahan Bumi wonorejo Nabire – Papua Tengah

KEPUTUSAN KETUA SEMENTARA MAJELIS RAKYAT PAPUA NOMOR: 166 / 01 / KETUA MRP-PPT

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PEMILIHAN PIMPINAN DEFINITIF MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE TAHUN 2023 – 2028

KETUA SEMENTARA MAJELIS RAKYAT PAPUA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;
 - b. bahwa dengan telah dilantikanya Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028 oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, maka Anggota Majelis Rakyat Papua Perlu untuk melakukan pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
 9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 9);

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4321 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.4-4231 Tahun 2023 Nomor 100.2.1.4-6097 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.2-4231 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Tanggal 26 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyiapkan tempat dan tata cara pemilihan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
 2. Melaksanakan atau mendampingi Proses Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;
 3. Melaporkan hasil pemilihan Pimpinan Definitif Kepada seluruh Yang Mulia Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dan Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire

Pada tanggal : Desember 2023

MAJELIS RAKYAT PAPUA

Pimpinan Sementara



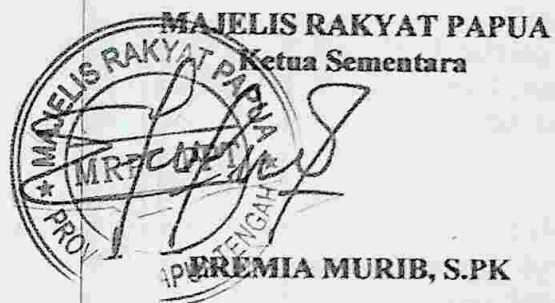
EREMIA MURIB, S.PK

RETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA
166 / 01 / KETUA MRP-PPT
: DESEMBER 2023

ANGGOTAAN PANITIA PELAKSANAAN PEMILIHAN PIMPINAN DEFINITIF
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
PERIODE TAHUN 2023 – 2028

KETUA	: EREMIA MURIB, S.PK
II. WAKIL KETUA I	: MIRNA BINGGORO HANIBORA
III. WAKIL KETUA II	: SEM YUKEI, S.Th
IV. ANGGOTA	: 1. OBETH MURIB, S.Sos 2. KITIMIN WONDA 3. IRISEN WONDA 4. YULIUS WANDAGAU, SE 5. AGUSTINUS ANGGAIBAK, SM 6. THOMAS MUTAWEYAO, A.MD.PD 7. MELKISEDEK FI RUMAWI 8. KORNELES MANIAWASI 9. MELINA EDOWAI, SE 10. GERMANUS GOO, SE 11. HENDERIKUS MAGAI, S.Sos 12. YANCE YEIMO, S.Th., M.Th 13. BENNY ZONGGONAU 14. YULCE MAGAI, SE 15. PIPINA WONDA, S.Pt 16. TEMIRA WONDA, S.Pi 17. SERA TABUNI, S.Sos 18. VALENTINA KEMONG 19. MARSELA TOMATIPI, SE 20. PAULINA MAREY 21. DEBORA MOTE, S.Sos 22. AGATA TEKEGE 23. MELIANA DOGOMO, S.IP 24. SELPINA MUYAPA, S.Sos 25. MARIA MOTE, S.Pd 26. ANASTASYA BELAU 27. YEHUDA GOBAI, S.Th. M.Si 28. WENIOR PAKAGE, SH. MH 29. YOEL MURIB, S.Sos 30. ABET NEGOTIPAGAU 31. MARTHEN KAUKI WAIBUSI. SP.M.Si

32. YUNUS MBAUBEDARI, S.Th
33. Pdt. GIMAN MAGAL, S.Th
34. Pdt. GUA GIRE
35. ELIAS WONDA, S.Pd
36. N.D. MATHEUS WAKERKWA, BA
37. MARIA GOBAI
38. YACOBUS TAKIMAI
39. YAHYA S. W. IYAI



GOVERNMENT OF PAPUA PROVINCE
SECRETARY OF THE PAPUA PEOPLE'S COUNCIL
Mandala Kelurahan Bumi wonorejo Nabire – Papua Tengah

DECISION OF THE SECRETARY OF THE PAPUA PEOPLE'S COUNCIL

NUMBER: 800/17/SET MRP PPT

ABOUT
APPOINTMENT OF MODERATOR AND EVENT LEADER IN THE ELECTION
LEADERSHIP DEFINITIVE PAPUA PEOPLE'S COUNCIL PROVINCE PAPUA MIDDLE PERIOD
YEAR 2023 - 2028
BUDGET YEAR 2023

SECRETARY OF THE PAPUA PEOPLE'S COUNCIL

- Considering :**
- that in accordance with Law Number 15 Year 2022 concerning the Formation of Papua Province and Government Regulation Number 64 Year 2008 concerning the Change of Government Regulation Number 54 Year 2004 concerning the Papua People's Council;
 - that in the framework of supporting and successfully conducting the Election of the Definitive Papua People's Council Province Papua Tengah, it is necessary to appoint a Moderator and Event Leader to assist in the Election of the Definitive Papua People's Council Province Papua Tengah Period 2023 – 2028;
 - that for the purpose of the above letters a and b, it is necessary to be determined with the Letter of Decision of the Secretary of the Papua People's Council.

- Remembering :**
- Law Number 21 Year 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) and Law Number 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 - Law Number 2 Year 2021 concerning the Change of the Second of Law Number 21 Year 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua;
 - Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), as well as it has been changed several times with Law Number 9 Year 2015 concerning the Change of the Second of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Law Number 2 Year 2021 concerning the Change of the Second of Law Number 21 Year 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua
 - Law Number 15 Year 2022 concerning the Formation of Papua Province Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 - Government Regulation Number 54 Year 2004 concerning the Papua People's Council (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) as well as it has been changed into Government Regulation Number 64 Year 2008 concerning the Change of Government Regulation Number 54 Year 2004 concerning the Papua People's Council (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
 - Government Regulation Number 18 Year 2016 concerning Regional Instruments (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4321 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.4-4231 Tahun 2023 Nomor 100.2.1.4-6097 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.2-4231 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Tanggal 26 Oktober 2023;
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 tentang Penyusunan Tata Tertib bagi Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Priode 2023-2028, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Priode 2023-2028 dimkasud Diktum KESATU mempunyai tugas ikut berpartisipasi dalam acara kegiatan tersebut sesuai Tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire
Pada tanggal : 19 Desember 2023

SEKRETARIS
MAJELIS RAKYAT PAPUA


DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 19760423 199612 1 001

SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA

80/17/SET MRP PPT
: 19 DESEMBER 2023

MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN PEMILIHAN
KEANGGARAN MAJELIS RAKYAT PAPUA PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE
TAHUN 2023 - 2028
TAHUN ANGGARAN 2023

I. MODERATOR : DANIEL MAIPON, S.STP

II. PEMBAWA ACARA : CHRISTINA, S.Si

SEKRETARIS
MAJELIS RAKYAT PAPUA



DANIEL MAIPON, S.STP
NIP. 19760423 199612 1 001